ABSTRAK

Nurul Iman Adianta, 21382071068, *Analisis Keadilan Gender dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : Perspektif John Rawls*, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, **Pembimbing: Ach. Faidi, MA, LL.M.**

Kata Kunci: Keadilan Gender, Keterwakilan Perempuan, UU No 7 Tahun 2017, John Rawls.

Keadilan gender tidak hanya mencakup kesetaraan hak, tetapi juga akses dan peluang yang adil, termasuk Keterwakilan Perempuan dalam politik. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245, mencerminkan komitmen negara melalui kebijakan afirmatif dengan menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Penelitian ini meninjau kebijakan tersebut melalui teori keadilan John Rawls untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut mencerminkan keadilan substantif.

Ada tiga rumusan masalah penelitian ini, yaitu; Pertama : Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Pemilu anggota Legislatif Menurut UU No. 7 tahun 2017 ?, Kedua : Bagaimana penerapan keterwakilan perempuan Menurut Teori Keadilan John Rawls ?, Ketiga : Bagaimana Evaluasi keadilan gender perspektif John Rawls terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 ?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan menganalisis konsep keadilan gender menurut teori keadilan John Rawls serta penerapannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Data primer dalam penelitian ini meliputi UU No. 7 Tahun 2017 dan. Adapun data sekunder diperoleh dari buku *A Theory of Justice* karya John Rawls, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel daring, dan sumber relevan lainnya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Pemilu anggota legislatif telah diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui kebijakan afirmatif minimal 30%. Namun, implementasinya masih bersifat administratif dan belum menciptakan partisipasi yang substantif karena hambatan struktural dan kultural. Dalam perspektif teori John Rawls, Yaitu Konsep Justice as Fairness memiliki prinsip utama dalam keterwakilan perempuan, dapat dikaji melalui tiga prinsip: kebebasan dasar yang sama, kesetaraan kesempatan yang adil, dan prinsip perbedaan. Ketiganya memberi kerangka konseptual untuk memahami pentingnya partisipasi politik perempuan secara adil dan setara. Evaluasi terhadap undang-undang tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif mendukung kesetaraan gender, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan dalam politik.